

**PROPOSAL PENELITIAN**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
PADA KANTOR GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Dalam Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Sains Terapan  
Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan**

**OLEH:**

**WAHYU RAMADHAN H KAULAN**

**Nim 11 042 009**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN  
TAHUN 2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROPOSAL**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
PADA KANTOR GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA**

Oleh :

**WahyuRamadhan H Kaulan**

**NIM 11 042 009**

Proposal telah disetujui untuk diajukan dan dipresentasikan di hadapan Tim Penguji

Menyetujui,

Ketua Program Studi Sarjan Terapan Akuntansi Keuangan

Jeffry Otniel Rengku SE, MM, Ak  
NIP 19630924 199403 1 001

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROPOSAL**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
PADA KANTOR GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA**

Oleh :

**WAHYU RAMADHAN H KAULAN**

**NIM 11 042 009**

Telah dipresentasikan di depan Penguji pada tanggal  
17 Juni 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima  
Sebagai dasar penyusunan Laporan Tugas Akhir

**TIM PENGUJI**

Dosen Penguji 1

Dosen Penguji 2

**Stevie Kaligis, SE, MM, Ak**  
NIP 19630924 199403 1 001

**Siandwi Sagiman, SE, MM, Ak**  
NIP 19620210 199303 1 002

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang .....	1
B. RumusanMasalah .....	6
C. TujuanPenelitian .....	6
D. KegunaanPenelitian.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. TeoriKegunaanInformasi (Decision-Usefulness Theory).....	8
B. Teori Stakeholder .....	11
C. LaporanKeuangan .....	13
D. DimensiKualitasInformasi .....	15
E. SumberDayaManusia .....	17
F. SistemPengendalian Intern.....	18
G. Hipotesis.....	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. JenisPenelitian.....	24
B. TempatdanWaktuPenelitian .....	24
C. PopulasidanSampel .....	24
D. TeknikPengumpulan Data.....	25
E. AlatPengukur Data .....	25

F. Teknik Analisis Data.....	29
DAFTAR PUSTAKA .....	33
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	halaman
TABEL 1.1. Jumlah kasus kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan perundang-undangan berdasarkan entitas .....	2
TABEL 1.2. Opini LKPD Tahun 2009-2013 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan (Provinsi, Kabupaten dan Kota).....	3
TABEL 1.3. Data LKPD Provinsi Maluku Utara 2009-2013.....	3
TABEL 3.1. Pemberian Skor Jawaban Skala Likert .....	30

## DAFTAR GAMBAR

	halaman
GAMBAR 2.1. Financial Reporting Standards-setting Structure .....	9
GAMBAR 2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis .....	21

## DAFTAR LAMPIRAN

LembarAsistensi Proposal TugasAkhir

LembarKousoner



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Suatu organisasi yang didirikan sering diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, kemudian pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada UU Nomor 17 Tahun 2003 khususnya pasal 31, disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005.

Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni Relevan, Andal, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 456 LKPD Tahun 2013 tingkat provinsi/kabupaten/kota yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2014 menemukan 5.948 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern.

BPK juga menemukan dan mencatat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, melalui hasil pemeriksaan keuangan Semester I Tahun 2014 mengungkapkan 7.173 kasus yang meliputi belanja fiktif, kekurangan volume belanja pekerjaan atau barang, kelebihan pembiayaan, belanja tidak sesuai ketentuan, pembayaran melebihi standar, dengan total kerugian sebanyak 10,92 triliun sebagaimana disajikan pada table berikut.

**Tabel 1.1 Jumlah kasus kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan berdasarkan Entitas**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	SPI	Kepatuhan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	<b>Pusat</b>	<b>767</b>	<b>1.110</b>	<b>6.697.283,19</b>
II	<b>Daerah</b>	<b>5.133</b>	<b>6.018</b>	<b>4.206.685,47</b>
1	Provinsi	432	589	2.028.608,27
2	Kabupaten	3.779	4.3321	1.638.455,61
3	Kota	922	1.097	539.621,59
III	<b>BUMN &amp; Lainnya</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>24.558,60</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>5.948</b>	<b>7.173</b>	<b>10.928.527,26</b>

Sumber data : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) – IHPS I Tahun 2014)

BPK juga telah melakukan audit atas 456 LKPD tahun 2013, dengan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 153 LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 276 LKPD, opini Tidak Wajar (TW) atas 9

LKPD, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 18 LKPD. Daftar opini LKPD berdasar tingkat pemerintahan (Provinsi/Kabupaten/Kota) tersaji dalam tabel 1.2 yang sekaligus menunjukkan opini TW baik dalam pemerintahan provinsi, kabupaten maupun kota jumlahnya masih sangat sedikit.

**Tabel 1.2 Opini LKPD Tahun 2009-2013 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan**

Pemerintah	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	Tahun	WT P	WD P	T W	TM P	Jlh	WT P	WD P	T W	TM P	Jlh	WT P	WD P	T W	TM P
2009	1	24	3	5	33	7	240	37	95	379	7	66	8	11	92
%	3%	73%	9%	15%	100%	2%	63%	10%	25%	100%	7%	72%	7%	12%	100%
2010	6	22	0	5	33	16	254	23	103	396	12	67	3	11	93
%	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011	10	19	0	4	33	36	268	6	89	399	21	62	2	7	92
%	30%	58%	0%	12%	100%	9%	67%	2%	22%	100%	23%	67%	2%	8%	100%
2012	17	11	0	5	33	72	256	6	67	401	31	52	0	7	90
%	52%	33%	0%	15%	100%	18%	64%	1%	17%	100%	34%	58%	0%	8%	100%
2013	15	12	0	2	29	102	214	9	14	339	36	50	0	2	88
%	52%	41%	0%	7%	100%	30%	63%	3%	4%	100%	41%	57%	0%	2%	100%

(Sumber : [www.bkp.go.id](http://www.bkp.go.id))

**Tabel 1.3 Data LKPD Provinsi Maluku Utara 2009-2013**

Entitas Pemerintahan Daerah			Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013	
Provinsi Maluku Utara												
LKPD			9		10		10		10		10	
1	476	Prov. Maluku Utara	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP

2	477	Kab. Halmahera Barat	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
3	478	Kab. Halmahera Selatan	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	479	Kab. Halmahera Tengah	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TW
5	480	Kab. Halmahera Timur	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
6	481	Kab. Halmahera Utara	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
7	482	Kab. Kepulauan Sula	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
8	483	Kab. Kepulauan Morotai			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
9	484	Kota Ternate	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	485	Kota Tidore Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

(Sumber : [www.bkp.go.id](http://www.bkp.go.id))

Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa LKPD yang ada di Provinsi Maluku Utara memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian intern telah memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
3. Terlambat menyampaikan laporan
4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan, maka dalam penelitian ini juga penulis memfokuskan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah khususnya di pemerintahan Provinsi Maluku Utara

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Sistem Pengendalian Intern (SPI) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) apakah mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern (SPI) apakah mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengembangkannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan.
2. Bagi pemerintah daerah, sebagai masukan tentang kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi para akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori kegunaan Informasi (Decision-Usefulness Theory)**

Penelitian ini menggunakan teori kegunaan informasi (*decision-usefulness theory*). Orang pertama yang menggunakan paradigma kegunaan keputusan (*decision usefulness*) adalah Chambers. Ia mengatakan sebagai berikut:

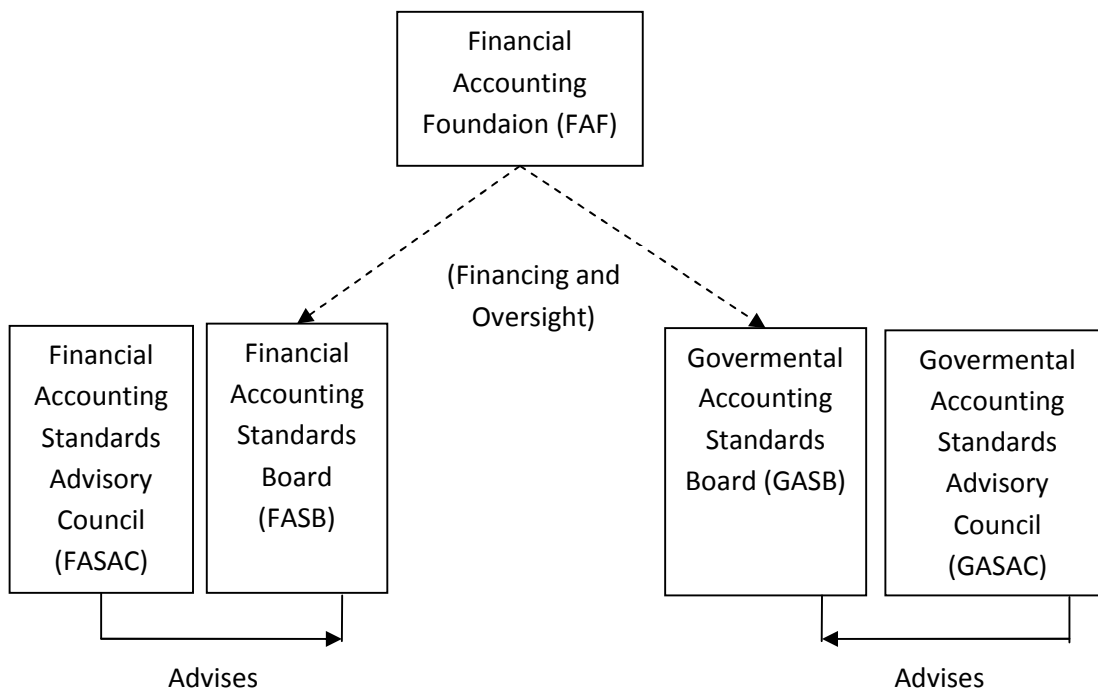
Oleh karenanya, akibat yang wajar dari asumsi manajemen rasional adalah bahwa seharusnya ada sistem yang menyajikan suatu informasi; seperti sistem yang diperlukan baik untuk dasar pembuatan keputusan atau dasar untuk memperoleh kembali konsekuensi keputusan. Sistem yang menyajikan informasi secara formal akan menyesuaikan dengan dua dalil umum. Pertama adalah kondisi dari setiap wacana ilmiah, system seharusnya secara logika konsisten; tidak ada aturan atau proses yang dapat bertentangan dengan setiap aturan atau proses lainnya. Kedua muncul dari pemakai laporan akuntansi sebagai dasar pembuatan keputusan dari konsekuensi praktik, informasi yang dihasilkan oleh setiap sistem seharusnya relevan dengan berbagai bentuk pembuatan keputusan yang diharapkan dapat digunakan (dalam Belkoui, 2001).

Staubus (2000) dalam Kiswara (2011) menyatakan teori kegunaan-keputusan (*decision usefulness theory*) informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual Financial Accounting Standard Boards (FASB), yaitu Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Staubus (2003) dalam Kiswara (2011) menyatakan pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu a theory of accounting to investors. Selain FASB, ada sebuah badan yang setara dengan FASB yaitu GASB. FAF membuat GASB pada tahun 1984 dalam hubungan “kakak-adik” dengan FASB.

GASB bertanggungjawab untuk menetapkan standar akuntansi untuk aktivitas dan transaksi dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan FASB menyusun standar akuntansi untuk semua organisasi lainnya termasuk non

pemerintahan dan organisasi non profit (Freeman, 2008). Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.1.

**Gambar 2.1** *Financial Reporting Standards-Setting Structure*



Sumber data : (Freeman, 2008)

Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. SFAC No. 2 tentang Qualitative Characteristics of Accounting Information menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (relevance) dan reliabilitas (reliability). FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan.

Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara



rasional bebas dari kesalahan dan bias, dan mewakili apa yang akan digambarkan. Agar relevan, informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan suatu keputusan. FASB menyatakan bahwa agar menjadi relevan bagi investor, kreditur, dan yang lain dalam rangka investasi, kredit dan keputusan sejenis maka informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal tersebut ditempuh dengan cara membantu pemakai dalam membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang atau untuk mengkonfirmasi atau membenarkan harapannya.

Kandungan kualitas primer kegunaan-keputusan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatanwaktuan (timeliness), nilai umpan balik (feed-back value), dan nilai prediktif (predictive-value), dan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya (representational faithfulness), netralitas (neutrality), dan dapat diperiksa (verifiability). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung antara kualitas primer, yaitu komparabilitas (comparability) dan taat asas (consistency).

Di Indonesia sampai dengan saat ini, telah ada komite yang bekerja menyusun standar akuntansi pemerintahan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 308/KMK/2002 yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), akan tetapi yang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pemerintah dengan Peraturan Pemerintah. Berbeda dengan GASB yang memiliki otoritas tertinggi, pemerintah Indonesia mengenal hirarki PABU dan SAK sebagai acuan utama yang memiliki otoritas.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2005 mengadopsi karakteristik kualitatif primer sebagaimana tercantum dalam SFAC No. 2. Hanya saja SAP menekankan pada empat prasyarat normatif yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk karakteristik konsistensi, menjadi bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

## 2.2 Teori Stakeholder

Freeman (1984) dalam Mainardes et al. (2011) menjelaskan *Stakeholder theory*, bahwa organisasi harus peduli dengan kepentingan stakeholders ketika membuat keputusan strategis. Meskipun setiap peneliti mendefinisikan berbeda tentang Stakeholder theory, prinsipnya sama yaitu perusahaan atau organisasi bisnis harus mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan pengaruh dari orang-orang atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan dan operasi (Frederick et al., 1992 dalam Mainardes et al., 2011). Teori stakeholder umumnya merupakan teori bagi perusahaan sektor swasta. Akan tetapi pada kenyataannya sudut pandang teori ini dapat diterapkan pada sector publik, dan sebagian pula diterapkan dalam konteks keputusan manajerial dalam pemerintahan. Berdasarkan kajian mendalam literatur Bovaird (2005), Frey (2003), Reidl (2004) dalam Huda (2009) mengidentifikasi sembilan stakeholder administrasi lokal, yaitu:

### 1. Masyarakat

Yaitu semua fungsi seseorang sebagai individu seperti sebagai pengguna layanan, wajib pajak, suara dalam pemilihan, dan sebagainya. Masyarakat mempengaruhi administrasi lokal melalui pemilihan dan pemungutan suara, serta interaksi sehari-hari mereka dengan administrasi dan politisi. Semakin pesatnya penggunaan internet di kalangan warga masyarakat sedikit banyak mendesak administrasi untuk mengadakan pelayanan secara on line.

### 2. Bisnis

Bisnis adalah dasar kesejahteraan ekonomi. Bisnis sangat mempengaruhi sistem administrasi-politik dan berada dalam hubungan yang konstan. Dalam konteks e-government, tekanan parsial dari bisnis pada administrasi meningkat dari fakta bahwa umumnya organisasi sektor privat memiliki teknologi yang lebih maju daripada sektor publik. Ditambah lagi operator sektor privat menjual barang dan jasanya kepada organisasi-organisasi sector publik.

### 3. Administrasi publik lain

Administrasi tingkat nasional (federal), regional (kantonal) dan administrasi lokal lainnya dalam kesehariannya memiliki hubungan interaksi dengan administrasi lokal, sehingga dapat dihitung sebagai satu stakeholder penting.

#### 4. Politisi

Politisi dan para pejabat, misalnya presiden atau pemimpin suatu daerah mempengaruhi kegiatan administrasi melalui keputusan dan otoritas mereka. Disamping itu pertanyaan mengenai ukuran administrasi yang optimal adalah keputusan politisi dan konsekuensi prioritas dimana politisi atau pejabat tersebut memberikan kebijakan publik. Terlebih lagi pelayan masyarakat pada umumnya dijabat oleh para politisi, kadang-kadang berada pada basis atau orientasi politiknya.

#### 5. Parlemen dan lembaga peradilan

Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai pembuat kebijakan dan aturan sebagai kerangka acuan bagi kegiatan administrasi dan interaksinya dengan pihak ketiga.

#### 6. *Non Governmental Organization (NGO)*, *International Organization (IO)*, dan asosiasi

NGO, IO, Parpol dan Lembaga Asosiasi mempengaruhi sistem administrasi dan politik melalui lobi-lobi mereka. Lembaga-lembaga tersebut berpartisipasi atau memiliki andil dalam pembuatan kebijakan yang mendasari kegiatan administrasi.

#### 7. *Media*

Lembaga administrasi menggunakan media sebagai sumber informasi. Selain itu, media juga berperan sebagai pembuka opini publik melalui penyiaran berita dan topik-topik informasi yang disajikan. Akhirnya, media juga mengekspos disfungsi pada sektor publik, khususnya dalam hal administrasi

#### 8. Pihak luar negeri

Semakin intensif hubungan sebuah negara dengan dunia luar maka kebijakan dalam negara tersebut disesuaikan dengan aturan-aturan internasional, walaupun pengaruh pihak luar negeri berbeda-beda sesuai dengan ukuran, kekuatan militer dan kekuatan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, negara-negara Eropa sangat mempengaruhi sistem administrasi politik di Swiss.

## 9. Tenaga kerja

Kekuasaan administrasi sangat ditentukan oleh karakter dan kapasitas para tenaga kerjanya serta hubungan diantara para tenaga kerja di dalamnya.

### 2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah ke dalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. aset;
2. kewajiban;
3. ekuitas dana;
4. pendapatan;
5. belanja;
6. transfer;
7. pembiayaan; dan
8. arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

## **2.4 Dimensi Kualitas Informasi**

Huang, *et al.* (1999) dalam Lillrank (2003) mendefinisikan 15 dimensi kualitas informasi yang dikelompokkan menjadi empat kelas:

1. Kualitas intrinsik: akurasi, obyektivitas, believability, dan reputasi,

2. Kualitas aksesibilitas: akses, dan keamanan,
3. Kualitas kontekstual: relevansi, nilai tambah, ketepatan waktu, kelengkapan dan jumlah data, dan
4. Kualitas representasi: interpretasi, kemudahan pemahaman, representasi ringkas, dan perwakilan konsisten.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Informasi Dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

### a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

### b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

### c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

## 3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode Sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. dapat menyesatkan.

## 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki

pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## **2.5 Sumber Daya Manusia**

Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno,2008).

## **2.6 Sistem Pengendalian Intern**

Xu, et al. (2003) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan system serta implementasi sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dari sebuah informasi. Keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan sumber daya manusia. Namun sistem yang sudah berjalan harus dikontrol agar tetap dapat berjalan baik.



Pengendalian intern yang didefinisikan oleh COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations*) (1992) adalah:

*Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management and other personel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:*

1. *Effectiveness and efficiency of operations*
2. *Reliability of financial reporting*
3. *Compliance with applicable laws and regulations."*

Tujuan yang pertama adalah menekankan pada tujuan dasar dalam setiap organisasi, mencakup kinerja, profitabilitas dan pengamanan sumber daya. Kedua adalah menyangkut kehandalan laporan organisasi. Terakhir adalah berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dimana organisasi itu berada. Sistem pengendalian intern bukan hal baru dalam pemerintahan. Petrovits *et al.* (2011) menyatakan:

*Internal control is broadly defined as the process put in place by management to provide reasonable assurance regarding the achievement of effective and efficient operations, reliable financial reporting, and compliance with laws and regulations.*

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan system informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi:

1. Pengendalian umum

Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak

aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisaan tugas, dan kontinuitas pelayanan.

## 2. Pengendalian aplikasi

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

SAS (Struktural Analitis Sintesis) mendefinisikan lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan pada pernyataan COSO (Sawyer et al, 2005) yaitu:

1. Lingkungan pengendalian,
2. Penilaian risiko,
3. Aktivitas pengendalian,
4. Informasi dan komunikasi
5. Pengawasan.

Terdapat hubungan langsung antara tujuan, yang merupakan hal yang diperjuangkan untuk dicapai organisasi dan komponen-komponen tersebut yang mencerminkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

**Control environment** (lingkungan pengendalian), menunjukkan atmosfer atau suasana (sets the tone) dalam suatu organisasi/ perusahaan yang mempengaruhi kesadaran pengendalian (control consciousness) dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi bagi komponen lainnya dan sangat dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan dari atas atau tone at the top.

**Risk assessment** (penilaian risiko), merupakan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola berbagai risiko dalam organisasi dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

**Control activities** (aktivitas pengendalian), mencakup kebijakan dan prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa semua tindakan dilaksanakan sesuai dengan arahan manajemen secara efektif.

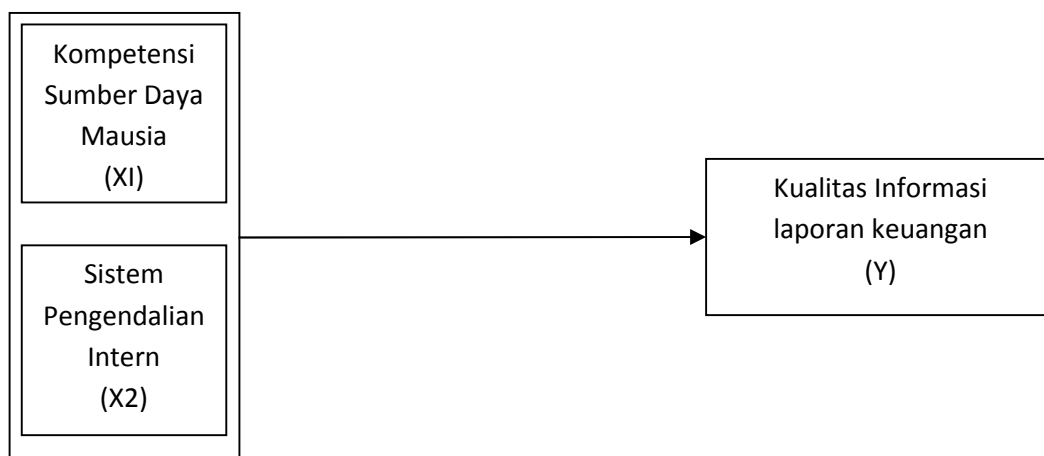
**Information and communication** (informasi dan komunikasi), system informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk

memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional.

**Monitoring** (pemantauan), merupakan proses penilaian terhadap kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian intern, termasuk modifikasi dan penyempurnaannya apabila diperlukan. Terdapat hubungan langsung antara ketiga kategori tujuan yang harus dicapai dengan kelima komponen pengendalian intern (menunjukkan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas informasi laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis**



Berdasarkan kerangka koseptual tersebut dapat diketahui pengaruh kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

## 2.7 Hipotesis

### 1. Hubungan kompetensi sumber daya manusia dan kualitas informasi laporan keuangan.

SDM merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human capital* merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan yang dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011).

Menurut Sulistyawati (2006) dalam Sutaryo (2011), SDM merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi system akuntansi keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Menurut Guy et al. (2002), kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan PEMDA.

Indriasari (2008) membuktikan dalam penelitian bahwa kapasitas sumberdaya berpengaruh terhadap keterpautan dan keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir provinsi Sumatera Selatan. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh kapaistas sumberdaya manusia terhadap ketepatanwaktuan penyampaian informasi dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kemampuan atau kapabilitas sumber daya manusia dengan kualitas informasi laporan keuangan.

*H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.*

## **2. Hubungan sistem pengendalian intern dan kualitas informasi laporan keuangan**

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen risiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholders.

Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD.

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau disclaimer” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011).

Indriasari (2008) dan Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Susanti, 2010. Nugraha dan Susanti (2010) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan.

*H2: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2013:13) pendekatan kuantitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel serta tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga menggunakan model regresi berganda.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sofifi. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada seluruh pegawai Akuntansi di Kantor Gubernur Maluku Utara yang merupakan responden dari penelitian ini. Waktu penelitian berlangsung sejak bulan Juli 2015 sampai dengan bulan September 2015.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian adalah Kantor Gubernur Maluku Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi pada Kantor Gubernur Maluku Utara yang berjumlah 36 orang. Pemilihan sampel penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa bagian akuntansi maupun bagian keuangan yang ada dalam Kantor Gubernur Maluku Utara merupakan salah satu bagian yang bertugas untuk menghasilkan *output* akhir berupa laporan keuangan pemerintah Provinsi Maluku Utara.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mendukung penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder, berikut penjelasan mengenai kedua teknik tersebut, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2013:193). Dalam hal ini data primer cara memperolehnya dengan menyebarkan kuesioner kepada Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan memberikan secara langsung kepada bagian Akuntansi. Jadi data bersumber dari informasi yang diberikan oleh Bagian Akuntansi Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Responden yang mengembalikan kuesioner yang telah diisi akan dijadikan sampel penelitian. Untuk itu kuesioner-kuesioner dari responden tersebut diseleksi terlebih dahulu guna mendapatkan kuesioner yang terisi secara lengkap seperti yang diharapkan peneliti untuk kepentingan analisis.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2013:193). Data sekunder penelitian ini berasal dari buku, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, sertadari internet yang berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 3.5 Alat Pengukur Data

Dalam penelitian ini alat pengukur data yang digunakan adalah dengan menggunakan bantuan program SPSS *for windows* versi 21 untuk menganalisis kuesioner yang diberikan kepada responden. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan kemudian dianalisis dengan berbagai uji statistik sebagai berikut:



## **1. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan valid dan reliabel, maka perlu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas.

### **a. Uji Validitas**

Kesahihan (validity) suatu alat ukur adalah kemampuan alat ukur itu untuk mengukur apa yang sebenarnya harus diukur atau dengan perkataan lain alat ukur dapat mengukur indikator-indikator suatu obyek pengukuran. Kesahihan itu perlu sebab pemrosesan data yang tidak sah atau bias akan menghasilkan kesimpulan yang tidak benar.

Untuk melihat apakah instrument tersebut valid, maka dilakukan uji validitas dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing butir pertanyaan terhadap total skor. Bila korelasi antara masing-masing butir terhadap total skor tersebut signifikan maka data tersebut dinyatakan valid.

### **b. Uji Reliabilitas**

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Azwar (1997), reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama.

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot. Pengukuran variabel tersebut dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain untuk mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Nunnally (1960) dalam Ghozali (2006) mengatakan pada umumnya suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60.

## **2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta

data yang dihasilkan memiliki distribusi normal. Apabila tidak dijumpai adanya multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, maka asumsi klasik telah terpenuhi. Uji asumsi klasik yang dilakukan menurut Ghozali (2006).

**a. Uji Normalitas**

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan: (a) melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, dan (b) normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

**b. Uji Multikolinearitas**

Menurut (santoso, 2014:189), Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variable independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

- 1) Jika nilai Tolerance  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$ , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut
- 2) Jika tolerance  $< 0,10$  dan VIF  $> 10$ , maka terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada/tidaknya pola tertentu pada grafik Scatter Plot dengan ketentuan:

- 1) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang kelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 3.7 Teknik Analisis Data

Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, karena jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, maka analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantitatifkan data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala likert 5 poin (*5-point likert scale*).

**Tabel 3.1 Pemberian Skor Jawaban Skala Likert**

Alternatif Jawaban	Penilaian	
	Positif	Negatif
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Netral (N)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

Dari tabel 3.1 diatas dijelaskan bahwa pemberian skor untuk nilai tertinggi 5 yaitu untuk alternative jawaban Sangat Setuju (SS), sedangkan skor untuk nilai terendah diberikan nilai 1 untuk alternative jawaban Sangat Tidak Setuju (STS).

Metode analisis yang digunakan adalah linear regression. Ghazali (2006) menjelaskan linear regression adalah regresi yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

### 1. Model Regresi

Model Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah MRA (*Moderated Regression Analysis*). MRA merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) dengan rumus persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana :

$y$  = Kualitas informasi laporan keuangan

$\alpha$  = Konstanta

$b_1X_1$  = Koefisien Regresi kompetensi Sumber daya manusia

$b_2X_2$  = Koefisien Regresi Sistem Pengendalian Intern

$e$  = Error

### 2. Koefisien determinasi

Koefisien determinan ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Range nilainya antar 0-1, apabila nilai ( $R^2$ ) kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya apabila ( $R^2$ ) besar berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen besar.

#### a. Uji signifikansi simultan (uji statistik f)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini

digunakan untuk menguji kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem pengendalian intern (SPI) secara bersama-sama terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi ( ) sebesar 5 persen atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi  $< 0.05$ , maka hipotesis diterima. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen, dan sebaliknya.

**b. Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t)**

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan untuk menguji kompetensi sumber daya manusia(SDM), sistem pengendalian intern (SPI) secara partial terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi ( ) sebesar 5 persen atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi  $<$  , maka hipotesis diterima, begitu pula sebaliknya.

Lampiran 1

**KUESIONER PENELITIAN**  
**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI MANADO**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Responden  
di Tempat

Dengan Hormat,

Saya adalah mahasiswa Diploma 4 Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado yang saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Diploma 4 (D-4) Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Manado. Berkaitan dengan hal tersebut, Saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk bersedia mengisi kuesioner dengan pernyataan-pernyataan yang tertera sebagai berikut ini. Bantuan Bapak/Ibu sangat berarti demi terselesaikannya penelitian ini. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini, dengan rendah hati Saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

## IDENTITAS RESPONDEN

Jenis Kelamin : [  ] Pria, [  ] Wanita

Usia : \_\_\_\_\_ Tahun

Jenjang Pendidikan : [  ] S3;  
[  ] S2;  
[  ] S1;  
[  ] D3;  
[  ] SMA

Lama Bekerja :

Jabatan :

### **Petunjuk Pengisian**

Pilihlah jawaban dengan memberi **tanda silang (x)** pada salah satu jawaban yang tersedia !

Skor **1** : Sangat Tidak Setuju (**STS**)

Skor **2** : Tidak Setuju (**TS**)

Skor **3** : Netral (**N**)

Skor **4** : Setuju (**S**)

Skor **5** : Sangat Setuju (**SS**)

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Pertanyaan	Nilai				
		STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
<b>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:</b>						
1.	Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kemampuan yang dimiliki oleh tim pelaksana sistem informasi akuntansi yang memenuhi syarat kualitatif sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).					
2.	Petugas sistem informasi akuntansi mengetahui dan memahami peraturan-peraturan keuangan yang terkait.					
3.	Penguasaan komputer merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang petugas sistem informasi akuntansi.					
4.	Aplikasi keuangan dan perkembangannya harus dikuasai dan di ikuti.					
5.	Petugas sistem informasi akuntansi harus berlatar belakang pendidikan akuntansi.					
6.	Peningkatan alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi pengelola keuangan.					
7.	Pelatihan atau workshop keuangan meningkatkan kemampuan bekerja.					
8.	Faktor usia mempengaruhi kemampuan dalam bekerja.					
9.	Rotasi atau perputaran posisi kerja diperlukan untuk mengembangkan kemampuan bekerja.					



## DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

No	Pertanyaan	Nilai				
		STS 1	TS 2	N 3	SS 4	SS 5
<b>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:</b>						
1.	Setiap transaksi diotorisasi oleh manajemen dalam lingkup kewenangannya.					
2.	Transaksi yang dicatat harus merupakan transaksi yang valid bukan fiktif.					
3.	Transaksi yang dicatat mewakili seluruh kejadian yang terjadi dan tidak ada satu transaksipun terlewatkan.					
4.	Aktiva dan dokumen dapat dijaga/diamankan dan diakses hanya oleh pihak yang sesuai dengan otorisasi manajemen.					
5.	Transaksi yang rinci telah dimasukkan dalam pencatatan secara akurat sesuai sumber dokumen.					
6.	Pengendalian sistem pengembangan dan dokumentasi berhubungan dengan (1) review, menguji dan mengizinkan perubahan sistem baru dan (2) pengendalian program.					
7.	Pengujian prosedural dan data, menyediakan kerangka kerja untuk mengontrol operasi komputer harian dan meminimalisir kesalahan pemrosesan data.					
8.	Terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas sesuai dengan deskripsi tugas.					
9.	Kebijakan akuntansi memuat aturan dan prinsip akuntansi dan pembuatan laporan keuangan Pemda.					

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA**

No	Pertanyaan	Nilai				
		STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
<b>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut:</b>						
1.	Informasi yang ada dalam laporan keuangan sesuai dengan harapan dan kebutuhan.					
2.	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat memperkirakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan pada periode berikutnya.					
3.	Laporan keuangan dapat membantu dalam pengambilan keputusan.					
4.	Laporan keuangan yang berkualitas memenuhi persyaratan normatif yaitu relevan, andal, dapat dipercaya dan dapat dibandingkan.					
5.	Setiap informasi dalam laporan keuangan disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga kekeliruan dalam interpretasi dan pengguna informasi tersebut dapat dicegah.					
6.	Informasi dalam laporan keuangan telah menggambarkan secara jujur semua transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan.					
7.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dapat dilakukan oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.					
8.	Informasi dalam laporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang mudah dipahami.					